

Nomor Surat	B.27.e-CSC/CSM/RGL/03/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	5
Perihal	Penyampaian Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG

Perseroan Menyampaikan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Ya)

Perseroan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 13 Maret 2026

Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link ir.bri.co.id pada tanggal 13 Maret 2026

Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)

A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)

Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :

E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
Laporan Emisi GRK Konsolidasi?	Tidak
Batasan Organisasi	Operasional/Finansial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini?	Tidak

Name	Total Emisi (tCO ₂ e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan	
Emisi langsung dari pembakaran stasioner	0
Emisi langsung dari pembakaran bergerak	105.949
Emisi langsung dari proses pengolahan	0
Emisi fugitive langsung	9.156
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Emisi Langsung (Scope 1)	115.105

Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli

Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli	330.035
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik)	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2)	330.035

Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi

Transportasi dan distribusi hulu	0
Perjalanan dinas	6.897
Transportasi dari klien dan pengunjung	0
Transportasi dan distribusi hilir	0
Perjalanan Karyawan	0

Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan

Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung	0
Pembelian Barang dan Jasa	700.340
Capital equipment/goods	0
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional	8.415
Aset Sewaan hulu	0

Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan

Investasi	12.370.526
Penggunaan produk yang dijual	0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual	0
Waralaba hilir	0
Aset Sewaan Hilir	0
Pengolahan produk yang dijual	0

Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya	
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3)	13.086.178
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)	445.140
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)	13.531.318
Offsets/Credits	0
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh)	0

E-02	Intensitas Emisi GRK	Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat	0
E-03	Konsumsi Energi listrik	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J)	0
		Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J))	365.472.236
		Total konsumsi energi (kWh or J)	365.472.236
E-04	Konsumsi Air	Total konsumsi air (m3)	2.043.589
E-05	Limbah yang dihasilkan	Total limbah yang dihasilkan (ton)	13.247.825

E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero?	Ya
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi?	2050
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen pencapaian target Net zero emission Perusahaan.	
Sejalan dengan komitmen nasional pencapaian Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060, BRI telah menyusun rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menetapkan target NZE pada tahun 2050 berdasarkan Science Based Target Initiatives (SBTi). Penetapan target ini menegaskan komitmen BRI untuk mencapai target lebih cepat dari target nasional. BRI juga merupakan lembaga keuangan pertama di Indonesia yang memiliki komitmen Near Term Target yang telah divalidasi SBTi, yang selaras dengan tujuan Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.	

E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi?	Ya
Target pengurangan emisi GRK	42 %
	285.577 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK?	2030

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?

Ya

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Sejalan dengan komitmen nasional pencapaian Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060, BRI telah menyusun rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menetapkan target NZE pada tahun 2050 berdasarkan Science Based Target Initiatives (SBTi). Penetapan target ini menegaskan komitmen BRI untuk mencapai target lebih cepat dari target nasional. BRI juga merupakan lembaga keuangan pertama di Indonesia yang memiliki komitmen Near Term Target yang telah divalidasi SBTi, yang selaras dengan tujuan Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Kesenjangan Gender

Level Jabatan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah pegawai	Persentase pegawai	Jumlah pegawai	Persentase pegawai
Entry-level	45.161	53.16 %	35.321	41.58 %
Mid-level	1.875	2.21 %	740	0.87 %
Senior-level	1.351	1.59 %	374	0.44 %
Executive-level	96	0.11 %	31	0.04 %
Total Pegawai	48.483	57.07 %	36.466	42.93 %

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur

Rentang Usia (tahun)	Level Jabatan								Jumlah Pegawai
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
18-25	4.339	9.033	0	0	0	0	0	0	13.372
25-35	18.143	13.817	723	405	36	11	0	0	33.135
35-45	18.532	9.847	931	293	925	252	19	4	30.803
45-55	4.123	2.609	220	41	383	109	74	26	7.585
>55	24	15	1	1	7	2	3	1	54

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja	3.323 Pegawai	5,58 %
Jumlah Pegawai Baru/pengganti	12.070 Pegawai	14,21 %

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	0 Pegawai	0 %

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%)
8.309 jam/pegawai	84.949	100 %

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
216	0,25 %

S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan	0
--	---

Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja

S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi?	Ya
Penerapan kebijakan hak asasi manusia dalam seluruh kegiatan operasional BRI diatur melalui Kebijakan Hak Asasi Manusia yang mengacu pada Surat Direksi No.B.1470-DIR/ ESG/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Kebijakan Hak Asasi Manusia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan rincian informasi terkait lainnya pada https://www.ir-bri.com/esg/human_right_commitment.html. Komitmen pemenuhan hak asasi manusia dilakukan BRI dalam seluruh rantai pasokan bisnisnya, serta dengan mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko bisnis terkait HAM, seperti pekerja paksa, perdagangan manusia, pekerja anak, kebebasan berasosiasi, hak perundingan kolektif, remunerasi yang adil, kesetaraan dan non-diskriminasi, perlindungan privasi, lingkungan operasi yang berkelanjutan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, BRI menerapkan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy) melalui Surat Direksi No. SK.B.1221-DIR/HCS/07/2022, yang menegaskan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, serta bebas dari diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan dalam bentuk apa pun. BRI juga menjamin perlindungan pekerja dari tindakan diskriminasi, pelecehan seksual maupun non-seksual, perundungan, serta berbagai bentuk kekerasan fisik, verbal, dan mental, dengan menyediakan mekanisme pengaduan melalui sistem pelaporan internal dan Whistleblowing System yang menjamin kerahasiaan pelapor.	
S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?	Ya
Sesuai dengan Surat Direksi No. B.1470-DIR/ESG/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Kebijakan Hak Asasi Manusia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia yang diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional dan hubungan bisnis perusahaan. Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui kerangka kerja Human Rights Due Diligence yang terstruktur, yang meliputi: 1) komitmen HAM; 2) identifikasi dampak dan risiko; 3) penilaian dampak dan risiko; 4) mitigasi dan remediiasi; serta 5) komunikasi dampak. Rincian informasi terkait lainnya pada https://www.ir-bri.com/esg/human_right_commitment.html.	

S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?	Ya
BRI berkomitmen terkait pemenuhan hak asasi manusia dalam seluruh kegiatan operasional dan rantai pasokan bisnisnya. Perusahaan melarang praktik pekerja anak, pekerja paksa, serta perdagangan manusia dalam seluruh aktivitas operasional maupun hubungan bisnis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya identifikasi dan pengelolaan berbagai risiko bisnis terkait hak asasi manusia, termasuk pekerja paksa, perdagangan manusia, pekerja anak, kebebasan berserikat, hak atas perundingan kolektif, remunerasi yang adil, kesetaraan dan non-diskriminasi, perlindungan privasi, lingkungan operasi yang berkelanjutan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Komitmen ini mengacu pada Surat Direksi No. B.1470-DIR/ESG/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Kebijakan Hak Asasi Manusia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rincian informasi terkait lainnya pada https://www.ir-bri.com/esg/human_right_commitment.html.	
S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?	Ya
Komitmen kesehatan dan keselamatan pekerja diterapkan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di seluruh unit kerja. Departemen Business Continuity Management (BCM) & Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang merupakan bagian dari Operational Risk Group (ORD) bertanggung jawab atas seluruh aspek SMK3, termasuk penyusunan, penyempurnaan, dan implementasi K3. Group Head ORD memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengawasan K3. Kebijakan SMK3 ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Edaran Nomor: SE.12-DIR/MPE/09/2025 Buku 2 yang mencakup berbagai aspek terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kebijakan ini disusun berdasarkan peraturan pemerintah dan standar ISO 45001 2018 tentang Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) dan diturunkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) dengan nomor SO.09-ORD/03/2025, serta berlaku bagi pekerja maupun non-pekerja seperti mitra dan pemasok di lingkungan operasional BRI seluruh Indonesia.	

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?	Ya
Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BRI merupakan aktivitas strategis perusahaan dalam menciptakan nilai bersama (creating shared value). Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan nilai bersama (creating shared value). Program ini tidak hanya mendukung kelompok rentan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan masyarakat, mendorong keberlanjutan bisnis jangka panjang, serta meningkatkan stabilitas industri keuangan. Selain itu, inisiatif TJSL BRI turut mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan perbankan. Pelaksanaan TJSL BRI dilakukan melalui program BRI Peduli yang mencakup berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, serta pengembangan usaha mikro dan usaha kecil. Pada tahun 2025, total realisasi dana program TJSL BRI mencapai Rp326 miliar yang dialokasikan untuk program sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui kontribusi non-tunai (in-kind giving), seperti bantuan fasilitas, program pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam proyek pengembangan masyarakat. Informasi lebih lengkap tersedia pada https://bri.co.id/tjsl.	

C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)

Tipe Manajemen Perusahaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Pihak Independen
Komisaris	0	6	0	3

Direksi	0	10	3	0
---------	---	----	---	---

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan

	Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan)	Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan	101	98,5 %
Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan	43	96,74 %

Kebijakan mengenai manajemen lainnya

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?	Ya
Berdasarkan Akta No.32 tentang Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024 terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Pasal 11 dan 12 untuk Direksi dan Pasal 14 dan 15 untuk Dewan Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan UU PT Nomor 40 Tahun 2007, terdapat pemisahan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pemisahan fungsi tersebut diharapkan mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. BRI juga menerapkan struktur tata kelola dua tingkat (two-tier system), di mana Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen sementara Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan operasional perusahaan. Struktur ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif dalam perusahaan. Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris BRI terdiri dari 6 anggota (termasuk 3 Komisaris Independen) dan Direksi terdiri dari 13 Direktur.	
G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris	Ya
Direksi: Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Penilaian mencakup kinerja Direksi secara kolektial maupun individual dan menjadi dasar dalam penetapan kompensasi serta insentif Direksi. Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian Key Performance Indicators (KPI) dan aspek Good Corporate Governance (GCG), dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Kontrak Manajemen Direksi BUMN. Proses penilaian KPI Direksi juga telah ditinjau oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan objektivitas dan keandalan hasil evaluasi. Dewan Komisaris: Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme self-assessment yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengawasan. Proses penilaian ini berpedoman pada sejumlah regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur secara kolektif berdasarkan pencapaian program kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun. Penilaian tersebut mempertimbangkan sejumlah kategori kinerja strategis, seperti Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta pada tahun 2025.	
G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris	Ya

Berdasarkan Akta No.32 Anggaran Dasar BRI tahun 2024 terdapat kriteria yang diatur pada Pasal 11 dan Pasal 14 mengenai kriteria ketentuan dan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/ MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.	
G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris	Ya
BRI memiliki kriteria khusus dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Akta No. 32 tentang Anggaran Dasar BRI Tahun 2024, ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, serta tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 11 untuk Direksi dan Pasal 14 untuk Dewan Komisaris. Penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, proses pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022.	
G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?	Ya
BRI telah memiliki Kode Etik yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09.a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Buku 6 tentang Perubahan Pertama atas Corporate Governance. Penerapan Kode Etik merupakan nilai dasar bagi Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional, diterapkan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan. Untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan perusahaan, BRI memiliki kebijakan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Surat Edaran Direksi Kebijakan Corporate Governance nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 Buku 3 tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi dan SE.09b-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 juli 2024 Buku 4 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 2016. Kebijakan ini menetapkan standar operasional, pengendalian risiko, dan kepatuhan untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, dan fraud. BRI juga mempertahankan sertifikasi ISO 37001 2016 Anti Bribery Management System, memastikan implementasi sistematis di seluruh unit bisnis hingga periode sertifikasi berakhir pada 2026.	
G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?	Ya
BRI menerapkan kebijakan dengan tujuan mendukung dan memastikan perlakuan yang adil dan setara guna melindungi hak-hak dasar dari seluruh pemegang saham sebagai bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG). Perusahaan memastikan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak yang setara melalui penerapan prinsip one share, one vote serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang transparan dalam pengambilan keputusan strategis. BRI juga menyediakan akses informasi yang setara melalui berbagai saluran resmi, seperti fungsi Investor Relations, situs web perusahaan, paparan publik, serta laporan berkala sesuai ketentuan pasar modal. Selain itu, kebijakan terkait insider trading, benturan kepentingan, serta transaksi dengan pihak berelasi diterapkan untuk menjaga transparansi dan melindungi kepentingan seluruh investor, termasuk pemegang saham minoritas.	
G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?	Ya
BRI has established policies to prevent and manage conflicts of interest applicable to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees as part of its Good Corporate Governance (GCG) framework. These policies are stipulated in the Board of Directors Circular Letter No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 on Corporate Governance (Book 1: Conflict of Interest Management) and the Board of Directors Charter pursuant to Decree No. B.299-DIR/SKP/04/2020. The policy requires the Board of Directors and the Board of Commissioners to perform their management and supervisory functions independently, objectively, and free from personal or affiliated interests. Its implementation is guided by the principles of prioritizing the interests of the Company and the public,	

ensuring transparency in managing conflicts of interest, upholding individual accountability, and fostering an organizational culture that supports the prevention and control of conflicts of interest.

D. Lain-lain

Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG

Kinerja	Kode	Nama Metrik	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan
Lingkungan	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca	68,243,244,245
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	69,70,71,243
	E-03	Konsumsi Energi Listrik	77,242
	E-04	Konsumsi Air	78,242
	E-05	Limbah yang Dihasilkan	78,243
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission	47,48,49,68
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca	47,48,49,69
Sosial	S-01	Kesetaraan Gender	292
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur	292
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai	197,235
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara	0
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	233,234
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja	196
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	134
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi	190,207
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia	190,207
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa	133,182,207
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan	195
	S-12	Pencegahan Konflik Kepentingan	198,199,200,201,202,203,204,205,206,24

Tata-kelola	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi	144,160
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan	159
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO	143,144
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris	175
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris	173
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan	170
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi	131,137,138,139,140
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham	171
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan	160

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga

Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan

☒ Ya ☐ Tidak

☒ GRI

☒ TCFD

☐ CDP

☒ IFRS S1

☒ IFRS S2

☒ SASB

☐ Others, please specify

Assurance dan validasi pihak ketiga

☒ Ya

Nama pihak ketiga	Lingkup pekerjaan
PT Dekar Verite Asia	Independence Assurance Sustainability Report Menurut AA1000SA
Sucofindo International Certification Services	1. Batasan organisasi adalah pengendalian operasional 2. Aktivitas

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhanny

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210

Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Nama Pengirim	Dhanny
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	19-03-2026 16:17
Lampiran	1. B27e CSC.pdf
	2. BRI_AR_English.pdf
	3. BRI_AR_Indonesia.pdf
	4. BRI_SR_English.pdf
	5. BRI_SR_Indonesia.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B.27.e-CSC/CSM/RGL/03/2026
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	5
Subject	Submission of Annual And Sustainability Report

The Company hereby submit Annual And Sustainability Report Report 2025 for the period of 01 Januari 2025 to 31 Desember 2025 in Indonesia dan Inggris

Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes)

The Company made invitations to the Annual General Meeting of Shareholders on 13 Maret 2026

The information referred above has been published on the Company's website ir.bri.co.id at 13 Maret 2026

Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)

A. Environmental Performance

The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:

E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report	
Consolidated GHG Emission Report?	No
Organizational Boundaries	Operasional/Finansial
Any subsidiaries that are not included in the report?	No

Name	Total emission (tCO ₂ e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	
Direct emissions from stationary combustion	0
Direct emissions from mobile combustion	105.949
Direct emissions from processes	0
Direct fugitive emissions	9.156
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Direct Emissions (Scope 1)	115.105
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	

Indirect emissions from imported/purchased electricity consumption	330.035
Indirect emissions from imported/purchased network energy consumption (excluding electricity)	0
Total Indirect Emissions (Scope 2)	330.035
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation	
Upstream transport and distribution	0
Business travels	6.897
Transportation of clients and visitors	0
Downstream transportation and distribution	0
Employee commuting	0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization	
Energy related activities not included in direct emissions and energy indirect emissions	0
Purchased goods and services	700.340
Capital equipment/goods	0
Waste generated in operations	8.415
Upstream leased assets	0
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization	
Investments	12.370.526
Use of sold products	0
End of life treatment of sold products	0
Downstream franchises	0
Downstream leased assets	0
Processing of sold products	0
Category 6: Indirect GHG emissions from other sources	

Other indirect emissions or removals	0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	13.086.178
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	445.140
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3)	13.531.318
Offsets/Credits	0
REC Purchases (kWh)	0

E-02	GHG Emissions Intensity	Total scope 1 and 2 emissions produced per revenue of listed compant (tCO2e/Rp)	0
E-03	Electricity Consumption	Total amount of energy directly consumed (kWh or J)	0
		Total amount of energy indirectly consumed (kWh or J)	365.472.236
		Total energy consumption (kWh or J)	365.472.236
E-04	Water Consumption	Total water consumed (m3)	2.043.589
E-05	Waste Generation	Total waste generated (ton)	13.247.825

E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target	
Does the Company have a net zero emission target commitment?	Yes
What year is the Company's net zero emission published target?	2050
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company's commitment in achieving net zero emission target.	
In alignment with Indonesia s national commitment to achieve Net Zero Emissions by 2060, BRI has developed a climate adaptation and mitigation plan, setting its NZE target for 2050 based on the Science Based Targets initiative (SBTi). This target demonstrates BRI s commitment to achieving net zero earlier than the national timeline. BRI is also the first financial institution in Indonesia to have a Near Term Target validated by SBTi, aligning with the Paris Agreements goal of limiting global temperature rise to 1.5 degree Celsius.	

E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target	
Does the Company commit to reducing GHG emission?	Ya
What is the Company's GHG emission reduction target?	42 %
	285.577 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target?	2030

Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?

Yes

Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year

"To achieve its future emission reduction targets, BRI had outlined concrete action plans, including increasing investments in renewable energy projects and collaborating with debtors to accelerate the adoption of environmentally sustainable business practices.

Several initiatives have been implemented, including optimizing electricity usage, fostering an energy conscious workplace culture, adopting energy efficient technologies such as LED lighting, optimizing elevator operations, and reducing fuel consumption through vehicle age restrictions and regular maintenance. As of 2025, BRI operated 926 eco friendly vehicles (including motorcycles and cars) and installed solar panels at 152 operational units as part of its Green Network initiative to support low-carbon operations.

To monitor the achievement of Scope 3 emission targets, BRI has established emission reduction targets for each industry sector based on the Sectoral Decarbonization Approach (SDA). For portfolio segments that do not follow the SDA, BRI applies the Temperature Rating (TRA) methodology. In terms of operational emission performance in 2025, BRI recorded a decrease of 7.29% in Scope 1 emissions and 4.71% in Scope 2 emissions compared to 2024. In addition, the SDA and TRA indicators also declined compared to the previous years targets.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Gender Diversity

Job positions	Men		Women	
	Number of employees	Percentage of employees	Number of employees	Percentage of employees
Entry-level	45.161	53.16 %	35.321	41.58 %
Mid-level	1.875	2.21 %	740	0.87 %
Senior-level	1.351	1.59 %	374	0.44 %
Executive-level	96	0.11 %	31	0.04 %
Total Pegawai	48.483	57.07 %	36.466	42.93 %

S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Age group (years)	Job levels								Number of employees
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	
18-25	4.339	9.033	0	0	0	0	0	0	13.372
25-35	18.143	13.817	723	405	36	11	0	0	33.135
35-45	18.532	9.847	931	41	925	252	19	4	30.803
45-55	4.123	2.609	220	41	383	109	74	26	7.585
>55	24	15	1	1	7	2	3	1	54

S-03 Employees Turnover

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
--	---	--------------------------------

Number of employees resigned	3.323 Employees	5,58 %
Number of newly appointed Employees	12.070 Employees	14,21 %

S-04 Temporary Worker

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Total company headcount held by contractors and/or consultants	0 Employees	0 %

S-05 Employee Training and Development

Average training hour per employee (in reporting year)	Total employee attending company training program	Percentage of employee attending company training program (%)
8.309 hours/employee	84.949	100 %

S-06 Injury Rate

Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees (%)
216	0,25 %

S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse

Number of incidents regarding human rights abuse (in reporting year)	0
--	---

Company Policy Regarding Employees

S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or non-discrimination?	Yes
---	-----

S-09 Does the company has a policy regarding human rights?	Yes
--	-----

S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced labor?	Yes
--	-----

S-11 Does the company have a company policy regarding occupational health and safety as well as a safe working environment for all employees?	Yes
---	-----

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to the community or registered non-profit organizations?	Yes
---	-----

C. Governance Performance

G-01 Board Diversity and Independence

Type of Company Board	Number of seats on Company	Seats Occupied by Men	Seats Occupied by Women	Seats Occupied by Independent Party
Commissioners	0	6	0	3
Directors	0	10	3	0

G-02 Board Meeting Attendance

	Number of board meetings (in reporting year)	Percentage of board meeting attendances (in reporting year)
Director Attendance to Board Meetings	101	98,5 %
Comissioner Attendance to Board Meetings	43	96,74 %

Other governmental-related policy

G-03 Does the company has a policy regarding separation of the Chairman of the Board and CEO?	Yes
Based on Deed No. 32 concerning the 2024 Articles of Association of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners are clearly defined in accordance with Articles 11 and 12 for the Board of Directors and Articles 14 and 15 for the Board of Commissioners. In accordance with Law (UU) Limited Liability Company (PT) No. 40 of 2007, the separation of functions between the Board of Directors and the Board of Commissioners constitutes one of the fundamental principles in the implementation of good corporate governance. This separation of functions is intended to support the establishment of sound, transparent, and accountable corporate governance. BRI also adopts a two tier governance structure in which the Board of Commissioners performs an independent supervisory role, while the Board of Directors is responsible for the management of the Company and its day to day operations. This governance structure ensures a clear separation between oversight and executive management functions within the Company. As of December 31, 2025, the Board of Commissioners consisted of six members (including three Independent Commissioners), while the Board of Directors consisted of thirteen Directors.	
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal?	Yes
Board of Directors: The Board of Directors performance is evaluated through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism by the Board of Commissioners and shareholders. The assessment covers both collective and individual performance and forms the basis for determining directors compensation and incentives. The evaluation is based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) and Good Corporate Governance (GCG) aspects, in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on SOE Directors Management Contracts. The KPI assessment process has also been	

reviewed by a Public Accounting Firm to ensure objectivity and reliability. Board of Commissioners: The Board of Commissioners performance is evaluated through a self-assessment mechanism conducted at least once a year, with the results reported at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) as part of the Board s accountability in performing its supervisory function. The evaluation process refers to several applicable regulations, including OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies, OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies, and OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016 on the Assessment of Commercial Bank Soundness. The performance indicators or criteria of the Board of Commissioners are assessed collectively based on the achievement of the annual work program and the approved Work Plan and Budget (RKA), which is established at the beginning of each year. The evaluation considers several strategic performance categories, such as Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Enhancement, and Talent Development in 2025.	
G-05 Does the company has a policy regarding board training and development?	Yes
Based on Deed No. 32 of BRI s Articles of Association for the year 2024, the criteria regulated in Article 11 and Article 14 scope of the provisions and requirements for becoming a member of the Board of Directors and Board of Commissioners. Additionally, as regulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 of 2021 concerning the Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterpris, which was later amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-7/MBU/09/2022 of 2022 regarding Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on the Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.	
G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and re-election?	Yes
BRI applies specific criteria in the selection of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Based on Deed No. 32 concerning the 2024 Articles of Association of BRI, the provisions regarding the criteria, qualifications, and appointment requirements for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are stipulated in Article 11 for the Board of Directors and Article 14 for the Board of Commissioners. The appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is conducted through the General Meeting of Shareholders (GMS). In addition, the nomination and appointment process for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to applicable regulations, including Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK.04/2014 and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on the Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-7/MBU/09/2022.	
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-corruption?	Yes
"BRI has established a Code of Conduct as outlined in the BRI Board of Directors Circular Letter No. SE.09.a-DIR/KEP/03/2023, Book 6 dated October 31, 2023, regarding the First Amendment to Corporate Governance. The implementation of the Code of Conduct serves as a fundamental guideline for the Company, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees in carrying out their duties professionally. It is implemented continuously through attitudes, actions, commitments, and regulations that support the development of corporate culture. To prevent Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) within the company, BRI has established an Anti-Corruption and Anti-Bribery policy as stipulated in the Board of Directors Circular Letter on the Corporate Governance Policy No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 dated March 15, 2023, Book 3 on Anti Bribery and Gratuity Control, and SE.09b-DIR/KEP/03/2023 dated July 31, 2024, Book 4 on the ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System. These policies establish operational standards, risk controls, and compliance requirements to prevent corruption, collusion, nepotism, and fraud. Additionally, BRI has maintained ISO 37001 2016 Anti Bribery Management System certification, ensuring systematic implementation across all business units, with the certification valid until 2026.	

G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of shareholders?	Yes
BRI has implemented policies aimed at supporting and ensuring fair and equal treatment for all shareholders as part of its commitment to Good Corporate Governance. The Company upholds equal shareholder rights through the one share, one vote principle and transparent decision-making processes conducted through the General Meeting of Shareholders (GMS). BRI also provides equal access to material information through official channels, including Investor Relations, the corporate website, public disclosures, and periodic reports, in accordance with capital market regulations. In addition, policies governing insider trading, conflicts of interest, and related-party transactions are implemented to maintain transparency and safeguard the interests of all investors, including minority shareholders.	
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of directors/commissioners to prevent conflicts of interest?	Yes
BRI has established a conflict of interest policy as set out in the Board of Directors Circular Letter No. SE. 09-DIR/KEP/03/2023 dated March 15, 2023, regarding Corporate Governance (Book 1 on Handling Conflict of Interest), and in the Board of Directors Charter pursuant to Decree No. B.299-DIR/SKP/04/2020 dated April 24, 2020. The fundamental principles for managing conflicts of interest are: 1. Prioritizing the public interest. 2. Ensuring transparency in the handling and overseeing conflicts of interest. 3. Encouraging personal responsibility and exemplary behavior. 4. Establishing and fostering an organizational culture capable of managing conflicts of interest.	

D. Other

Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics

Kinerja	Kode	Metric Name	Pages in the Sustainability/Annual Report
Environment	E-01	Greenhouse Gas Emission Report	68,243,244,245
	E-02	Greenhouse Gas Emission Intensity	69,70,71,243
	E-03	Electricity Consumption	77,242
	E-04	Water Consumption	78,242
	E-05	Waste Generated	78,243
	E-06	Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	47,48,49,68
	E-07	Company Commitment to Reduce Emission	47,48,49,69
Social	S-01	Gender Equality	292
	S-02	Employees by Gender and Age Group	292
	S-03	Employee Turnover Rate	197,235
	S-04	Number of Temporary Officers	0
	S-05	Employee Training and Development	233,234
	S-06	Number of Work Accidents	196
	S-07	Human Rights Violation Incidents	134
	S-08	Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	190,207
	S-09	Policy on Human Rights	190,207
	S-10	Child Labor and/or Forced Labor Policy	133,182,207
	S-11	Occupational Health and Safety Policy and Safe and Secure Work Environment are provided to all employees.	195
	S-12	Corporate Social Responsibility	198,199,200,201,202,203,204,205,206,24

Governance	G-01	Management Diversity and Independence	144,160
	G-02	Total Attendance of Directors and Commissioners to Board Meetings	159
	G-03	Chairman of the Board and CEO Separation Policy	143,144
	G-04	Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	175
	G-05	Board of Directors and Commissioners Training Policy	173
	G-06	Special Criteria for Election of the Board	170
	G-07	Code of Ethics and/or Anti-Corruption	131,137,138,139,140
	G-08	Fair Treatment Policy for Shareholders	171
	G-09	Conflict of Interest Prevention Policy	160

Referenced International Standards and Third Party Verification

Alignment with sustainability reporting framework ☒ Yes ☐ No ☒ GRI ☒ TCFD ☐ CDP ☒ IFRS S1 ☒ IFRS S2 ☒ SASB ☐ Others, please specify							
null							
Third-party assurance and/or validation ☒ Yes							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Name of third-party service provider</th> <th>Scope of Work</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Dekar Verite Asia</td> <td>Independence Assurance Sustainability Report Menurut AA1000SA</td> </tr> <tr> <td>Sucofindo International Certification Services</td> <td>1. Batasan organisasi adalah pengendalian operasional 2. Aktivitas</td> </tr> </tbody> </table>		Name of third-party service provider	Scope of Work	PT Dekar Verite Asia	Independence Assurance Sustainability Report Menurut AA1000SA	Sucofindo International Certification Services	1. Batasan organisasi adalah pengendalian operasional 2. Aktivitas
Name of third-party service provider	Scope of Work						
PT Dekar Verite Asia	Independence Assurance Sustainability Report Menurut AA1000SA						
Sucofindo International Certification Services	1. Batasan organisasi adalah pengendalian operasional 2. Aktivitas						

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhanny

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210

Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Sender Name	Dhanny
Function	Corporate Secretary
Date and Time	19-03-2026 16:17
Attachment	1. B27e CSC.pdf
	2. BRI_AR_English.pdf
	3. BRI_AR_Indonesia.pdf
	4. BRI_SR_English.pdf
	5. BRI_SR_Indonesia.pdf

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.